



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-24
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmadja, I Dewa Gede, Suko Wiyono, dan Sudarsono, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, Sixth Edition
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Efendi, A'an, dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary (8 th edition)*, Thomson West, U.S.A
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta



- Huda, Ni'matul, 1999, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoretis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, PSH FH UII, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum: Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta
- M. Wantu, Fence, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta
- Manan, Bagir, 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Marbun, S.F., 2015, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Media Group, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta



Sihombing, Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Cetakan ke-8)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

Suarda, I Gede Widhiana, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang

Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung

Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Ghalia, Jakarta

Voll, Willy D.S., 2013, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

#### **ARTIKEL JURNAL**

Aang Achmad, “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik ke dalam Lapangan Hukum Privat”, *Mimbar Hukum*, Vol.23, No.3, Oktober 2011

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1, 2017

Agung Barok Pratama, “Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law”, *Supremasi Hukum*, Vol.17, No.2, Juli 2021

Ahmad Gelora Mahardika, “Potensi Penyimpangan Hukum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, No.2, Mei, 2020



- Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.01, Maret 2017
- Aris Arianto, dkk., “Makna Persetujuan Bersama DPR dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Mimbar Yustitia*, Vol.3, No.1, Juni 2019
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *PJIH*, Vol.4, No.2, 2017
- Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Emerson Yuntho, dkk., “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”, *Policy Paper Indonesia Corruption Watch*, 2014
- Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna Erliyana, “Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020”, *Pakuan Law Review*, Vol.06, No.02, Juli-Desember 2020
- Fajar Sugianto, “*Net Benefit Analysis to the Referent Group* Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.23, Februari 2016
- Farhan Permaqi, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.04, Desember 2017
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.19, No.3, Oktober 2007
- Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.4, Oktober 2017
- Harun Alrasyid, “Pengertian Keuangan Negara”, *Hukum dan Pembangunan*, XXV, No.2, 1995
- Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol.18, No.2, April 2011



- Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No.1, April 2019
- Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.1, Maret 2017
- Paramita Prananingtyas, “Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1, No.1, November, 2017
- Prasetyo Budi W, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, “Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.4, 2016
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.02, Juni 2016
- Richo Andi Wibowo, “When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences”, *Crime, Law, and Social Change*
- Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.3, Juli 2010
- Rizki Agung Firmansyah, “Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurist-Diction*, Vol.3, No.2, 2020
- Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.3, No.3, 2013
- Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona”, *ADALAH*, Vol.4, No.1, 2020
- Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.4, No.4, November, 2020
- Suhendar, “Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-



XVI/2016”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No.1, Maret 2017

Surya Oktaviandra, “Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana bagi Pejabat Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.50, No.2, 2020

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, Mei 2014

Yeni Widowaty, “Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime”, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.2, Agustus 2012

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) (Lembaran Negara Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660 yang telah dicetak ulang).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)



Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 879)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian atas Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian atas UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

## **INTERNET**

Abdul Bari, “Jamkrindo Lanjutkan Sosialisasi Penjaminan Kredit Modal Kerja”, <https://bumn.go.id/post/jamkrindo-lanjutkan-sosialisasi-penjaminan-kredit-modal-kerja>, diakses pada 20 September 2021

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>, diakses pada 10 Oktober 2021, lihat juga Siaran Pers, “Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, SP-27/KLI/2020

Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Buku Informasi Modul 02, “Hukum dan Sistem Peradilan Pidana”, Komisi Pemberantasan Korupsi

Humas DJKN, “PMK 118, Upaya Pemerintah Optimalisasi Hasil Investasi Pemerintah PEN”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21813/PMK-118-Upaya-Pemerintah-Optimalisasi-Hasil-Investasi-Pemerintah-PEN.html>, diakses pada 20 September 2021

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN, <https://jdih.bumn.go.id/uu>, diakses pada 20 November 2021



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring  
<https://kbbi.web.id/dasar>

Kemenkeu RI, “Pernyataan Menteri Keuangan”,  
<https://www.kemenkeu.go.id/covid19>, diakses pada 10 Oktober 2021

Kemenkeu, “Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan Tidak untuk Dua Hal ini”,  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penempatan-dana-pemerintah-di-perbankan-tidak-untuk-dua-hal-ini/>, diakses pada 20 September 2021

Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14955/konpers-apbnkita-apr20.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021

Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15102/peran-perppu-1-2020.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021

Kementerian Keuangan RI, [https://www.kemenkeu.go.id/media/15114/kondisi-perekonomian\\_.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/15114/kondisi-perekonomian_.pdf), diakses pada 10 Oktober 2021

Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15148/kinerja-belanja-terkini-hingga-8-mei-2020.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021

Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15236/konpers-apbnkita-mei20.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021

Kementerian Keuangan, “Kinerja Perekonomian dan Sinergi Kebijakan Nasional di Periode Covid-19”, Laporan Perekonomian Indonesia 2020,  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4\\_LPI2020\\_BAB2.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4_LPI2020_BAB2.pdf), diakses pada 16 Oktober 2021

Kementerian Keuangan, “Kinerja Perekonomian dan Sinergi Kebijakan Nasional di Periode Covid-19”, Laporan Perekonomian Indonesia 2020,  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4\\_LPI2020\\_BAB2.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4_LPI2020_BAB2.pdf), diakses pada 16 Oktober 2021

Kementerian Keuangan, “Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>, diakses pada 16 Oktober 2021

Kementerian Keuangan, “Pemulihan Ekonomi Nasional: Penempatan Dana pada Bank Umum”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15484/penempatan-dana-pada-bank-umum-pemerintah-untuk-pen.pdf>, diakses pada 20 September 2021

Media Internal Kementerian BUMN, Pemegang Saham, Edisi 4, Mei 2021



Public Relations KAI, “KAI Terima Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN) Senilai 3,5 Triliun”, [https://kai.id/information/full\\_news/4261-kai-terima-investasi-pemerintah-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi-nasional-ip-pen-senilai-rp35-triliun](https://kai.id/information/full_news/4261-kai-terima-investasi-pemerintah-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi-nasional-ip-pen-senilai-rp35-triliun), diakses pada 20 September 2021

Rahayu Puspasari  
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  
Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-ruu-p2-apbn-2020-disetujui-dpr-untuk-disahkan-bentuk-akuntabilitas-pengelolaan-apbn-yang-kredibel/>, diakses pada 10 Oktober 2021

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Data Sebaran di Indonesia”, <https://covid19.go.id/>, diakses pada 4 Oktober 2021

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, SP-27/KLI/2020, diakses pada 05 Mei 2021

Siaran Pers, “APBN 2020: Kebijakan Extraordinary APBN untuk Membantu Masyarakat serta Dunia Usaha Pulih dan Bangkit”, SP-01/KLI/2021

Siaran Pers, “RUU P2 APBN 2020 Disetujui DPR untuk Disahkan: Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan APBN yang Kredibel”, SP-69/KLI/2021

## SKRIPSI

Nabilla Yan Khansa, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pergeseran Paradigma Kekebalan Mutlak (*Absolute Immunity*) menjadi Kekebalan Terbatas (*Restrictive Immunity*) dalam Hukum Diplomatik”, *Skripsi*, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016

## SEMINAR

M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Seminar Nasional: Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, 23 Agustus 2006, Jakarta.

Ida Zuraida, “Batasan Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Perpajakan”, *SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara*.